

ABSTRACT

The background raised in this study is from corruption crimes committed by West Java KONI officials, in the facts of the trial it was found that the defendant made efforts to restore state financial losses in the plea bargaining system before the trial examination, so that in the indictment of the public prosecutor in Decision Number: 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bdg, the judge imposed a minimum sentence for the defendant. The phenomenon of the indictment of articles 2 and 3 becomes a minimum criminal system for defendants who want to be given minimum criminal sanctions, from the selection of cases and their backgrounds, then the legal issues are chosen, namely the relationship between Refund of State Financial Losses by the Defendant Corruption Can Eliminate Elements of Unlawful Acts In the decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg, and the Judge's Legal Interpretation of the Procedure for Returning State Financial Losses as the Basis for Determining the Minimum Criminal Case in Case Number 17/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bandung.

The writing of this thesis uses a normative juridical approach, the specifications of the research used are descriptive analytical case studies, the research stage to find primary data is carried out by literature studies, looking for aspects and legal consequences of the existence of these legal phenomena, then analyzing the legal aspects and connecting them with positive law.

Efforts to recover state financial losses in judicial proceedings will give different interpretations to judges, this has an impact on the criminal determination of the minimum criminal. starting from the process of returning state losses which are basically part of the confiscation process so that the defendant does not eliminate state losses. The judge's interpretation is expected to broaden his legal interpretation by adding fines to corporations that participate in corruption.

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah:

Akibat Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bandung Sebagai Dasar Penetapan Putusan Pidana Minimum

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.,selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus sebagai Dosen Wali Penulis.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta staf.
11. Sahabat penulis Elva Junior, Teh Sindyani, Hesti Depilania, Ai Sri Dewi, Neng Sri Fuji, Cherika Julianti serta Rita Kurniawati.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Yatno Supriatna. dan Ibunda tercinta Imas Fatonah, seseorang yang selalu memberikan dukungan yaitu Juan Wijaya Kusumah, dan tidak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh keluarga besar saya serta atasan, senior dan rekan-rekan di Kodiklat Hukum, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas

Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum UNLA khususnya Kelas C1-4 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, November 2021

Penulis,
Yanti Haryati
4115 1010 170190

DAFTAR ISI

PERNYATAAN

ABSTRAK.....

i

ABSTRACT.....

ii

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI.....

A. Latar Belakang Pemilihan 1

B. Kasus 7

BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI

A. Permasalahan 11

B. Tinjauan Teori.

1. Tindak Pidana Korupsi 11

2. Pengembalian Aset 16

3. Pidana Minimum..... 24

BAB RINGKASAN PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN

A Ringkasan Putusan No 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bdg. 29

B Pertimbangan Hukum 30

BABIV ANALISIS AKIBAT HUKUM PENGEMBALIAN

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PUTUSAN

NOMOR NOMOR 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.BANDUNG

SEBAGAI DASAR PENETAPAN PUTUSAN PIDANA

- A. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa
Korupsi Prina Nugraha Dalam Unsur Perbuatan melawan
hukum Dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Bdg 46
- B. Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Acara Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Penetapan Pidana
Minimum Dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020 / 53

BAB V KESIMPULAN

KESIMPULAN.....

- A 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat KONI Jawa Barat, dalam fakta persidangan ditemukan bahwa terdakwa melakukan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara dalam sistem *plea bargaining sistem* sebelum pemeriksaan persidangan, sehingga dalam dakwaan jaksa penuntut umum dalam Putusan Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2020/PN.Bdg, terdakwa di berlakukan pemidanaan minimum oleh hakim. Fenomena dakwaan pasal 2 dan pasal 3 menjadi suatu sistem pemidanaan minimum bagi terdakwa yang ingin diberikan sanksi pidana minimum, dari pemilihan kasus dan latar belakangnya, maka di pilih mengenai permasalahan hukumnya yaitu mengenai hubungan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Terdakwa Korupsi Dapat Menghilangkan Unsur Perbuatan melawan hukum Dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Bdg , dan Penafsiran Hukum Hakim Terhadap Acara Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Dasar Penetapan Pidana Minimum Dalam Perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2020 / PN.Bandung.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif , Spesifikasi penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif analitis studi kasus,tahap penelitian untuk menemukan data primer dilakukan dengan studi kepustakaan, mencari aspek ,dan akibat hukum dari adanya fenomena hukum tersebut, kemudian dilakukan analisis aspek hukum tersebut dan menghubungkannya dengan hukum positif.

Upaya Pengembalian kerugian keuangan negara dalam acara peradilan akan memberikan tafsir yang berbeda pada hakim, hal ini berdampak pada pidana penetapan pidana minimum . berawal dari proses pengembalian kerugian negara yang pada dasarnya merupakan bagian dari proses penyitaan agar terdakwa tidak menghilangkan kerugian negara. Penafsiran hakim di harapkan dapat memperluas penafsiran hukumnya dengan menambah pidana denda pada korporasi yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi.